

**KESADARAN HUKUM PEGAWAI NEGRI SIPIL (PNS) DI PENGADILAN  
AGAMA PAINAN TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Bidang Hukum Ekonomi Syariah



**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

Oleh

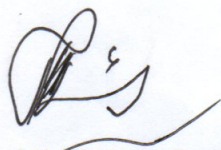
**DHANI NATAMA**  
**NIM: 1413030224**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
IMAM BONJOL PADANG  
1440H/2019 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "KESADARAN HUKUM PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI PENGADILAN AGAMA PAINAN TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI" disusun oleh Dhani Natama, NIM: 1413030224 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

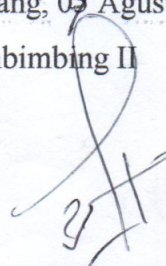
Pembimbing I



**Dr. H. Muklis Bahar, Lc. M.Ag**  
**Nip. 195901271992031001**

Padang, 03 Agustus 2019

Pembimbing II



**Supardi Dwimaputra, M.Ag**  
**Nip. 197607272008011012**

## ABSTRACT

This thesis is titled " *Kesadaran Hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Painan terhadap Pembayaran Zakat Profesi* " by Dhani Natama NIM 1413030224 Student of Islamic Economic Law Study Program UIN Imam Bonjol Padang. This research is due to the existence of a civil servant of the Painan Religious Court who paid their *zakat profesi* less than 2.5%, while according to Islam zakat must be issued as much as 2.5% if the property we have obtained has reached *Nisab*. The formulation of the problem is what factors influence civil servants in the Painan Religious Court in issuing zakat profesi and how the legal awareness of civil servants in the Painan Religious Court in paying *zakat profesi*. To answer this question, field research is conducted. Collection files techniques with interviews with civil servants of Painan Religious Court. Then the file is analyzed using qualitative descriptive analysis methods. From the results of the analysis conducted on these file, it can be concluded that the factors affecting civil servants in the Painan Religious Court in issuing *zakat profesi* are economic factors and the absence of strict orders from the Pesisir Selatan Regency / City governments and civil servants' legal employees civil society of Painan Religious Court can be assessed from indicators of legal awareness. The first is legal knowledge. The civil servants of Painan Religious Court is high, because their employees very know about *zakat profesi*. Second is understanding of law. The civil servants of Painan Religious Court is high, because their very understand about law and continue to issue their *zakat profesi*. Then is the legal attitude. The civil servants of the Painan Religious Court is high, because their employees still pay zakat and the last indicator is legal behavior. The civil servant of Painan Religious Court is high, because their employees of the Painan Religious Court take out about *zakat profesi*. So from the last indicators it can be said that the legal awareness of civil servants of the Painan Religious Court is high.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Kesadaran Hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Painan terhadap pembayaran Zakat Profesi”**. Disusun oleh **Dhani Natama NIM 1413030224** Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Painan yang membayar zakat profesinya kurang dari 2,5% sedangkan menurut islam zakat wajib dikeluarkan sebanyak 2,5% jika harta yang kita peroleh telah mencapai nisab. Yang menjadi rumusan masalah adalah apa faktor yang mempengaruhi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Painan dalam mengeluarkan zakat profesi dan bagaimana kesadaran Hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Pengadilan Agama Paianan Dalam Membayar Zakat Profesi. Untuk menjawab pertanyaan ini dilakukan penelitian lapangan (*Field research*). Teknik pengumpulan data dengan wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Painan. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap data tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Painan dalam mengeluarkan zakat profesi adalah faktor ekonomi dan tidak adanya perintah yang tegas dari pemerintah Kabupaten/Kota Pesisir Selatan dan kesadaran hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Painan dapat dinilai dari indikator-indikator kesadarannya. Indikator *pertama*, pengetahuan hukum, pengetahuan hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Painan dikatakan tinggi, karena pegawai mengeluarkan zakat profesinya *Kedua*, pemahaman hukum, pemahaman hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Painan dikatakan tinggi, karena dia paham dengan hukumnya dan tetap mengeluarkan zakat profesinya. *Ketiga*, sikap hukum, sikap hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Painan dikatakan tinggi, karena Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Painan masih membayar zakat dan indikator yang keempat yaitu perilaku hukum, perilaku hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Painan dikatakan tinggi, karena Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Painan mengeluarkan zakat profesinya. Maka dari empat indikator tersebut bisa dikatakan bahwa kesadaran hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Painan dikatakan tinggi.